

BAB II KERANGKA TEORI

A. Pancasila, Pengertian, Sejarah, Naskah dan Uraian

Pada dasarnya Pancasila memuat dua pokok pikiran, sebagai pedoman hidup masyarakat Indonesia dan sebagai landasan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari pemahaman kedua titik ini, berbagai akibat dapat dirasakan atau digambarkan. Kalau pengajaran tentang Pancasila sudah ada atau dimulai pada masa ini dengan masuknya Indonesia.¹⁴

Dalam arti yang sebenarnya, Pancasila dapat diuraikan dalam dua kata, yaitu panca khusus yang mengandung lima, dan sila yang berarti pembentukan atau rangkaian kata yang memiliki arti lima standar. Sementara itu, sesuai dengan ungkapan "sila" juga dapat diartikan, secara umum, yang mendasari cara berperilaku seseorang atau suatu negara, perilaku atau kegiatan yang sesuai kesopanan, kualitas yang mendalam dan kualitas etika.¹⁵

Menurut beberapa Ahli Pancasila diartikan sebagai berikut:

1. Menurut Ir. Soekarno Pancasila adalah ruh negara Indonesia. Pancasila adalah corak dan karakter bangsa Indonesia yang diwariskan secara turun-temurun dan Pancasila tidak dapat dipisahkan dari keberadaan individu Indonesia.¹⁶

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

¹⁴ Subandi al marsudi, *Pancasila dan UUD 45 dalam paradigma reformasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo,2001),1.

¹⁵ Subandi al marsudi, *Pancasila dan UUD 45 dalam paradigma reformasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo,2001),3.

¹⁶ Amiruddin, *Pancasila Dalam Bingkai Pemikiran Soekarno (fondasi moral dan karakter bangsa)*, *Al-harakah*, vol 03, no 1,2020,64.

2. Menurut Notonegoro, pengertian logis Pancasila adalah premis negara yang lugas dan objektif terkait dengan keselarasan negara, yang tidak dapat diubah melalui regulasi.¹⁷
3. Sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Pancasila berasal dari kata Pancasila yang mengandung arti lima dan sila yang berarti sendi-sendi, norma-norma dan landasan atau kaidah-kaidah tingkah laku yang penting dan terhormat. Konsekuensinya Pancasila adalah lima standar yang memuat standar atau standar mengenai cara berperilaku yang bermakna dan sah.¹⁸
4. Menurut dewan, lima pancasila adalah lima standar yang membentuk sistem kepercayaan negara. Kelima ketetapan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kaitan antara kelima undang-undang tersebut sangat erat, berurutan, dan tidak tetap satu-satu.

Telah dibuktikan sepanjang sejarah bahwa sebelum kedatangan kerajaan-kerajaan besar di nusantara, seperti kerajaan Majapahit di Jawa Timur pada abad XII-XVI dan kerajaan Sriwijaya di Sumatera pada abad VII-XII. Masyarakat yang hidup di Nusantara telah menunjukkan sifat-sifat Pancasila itu sendiri. misalnya, adanya keyakinan terhadap dunia yang tersembunyi, baik sebagai kecintaan terhadap makhluk halus yang digambarkan dengan animisme dan dinamisme, maupun keberadaan manusia yang sarat dengan perlawanan dan suasana yang tenang, membantu, bekerja sama, berpikir menjadikan lingkungan sehari-hari yang rukun, tenteram dan sejahtera dalam suasana kekeluargaan, yang dikomunikasikan dengan istilah gemah rifahlo

¹⁷ Museum Ugm, *Gagasan "Filsafat Pancasila" Prof. Notonegoro*. 1 November 2021, <https://museum.ugm.ac.id/2021/11/01/gagasan-filsafat-Pancasila-prof-notonagoro/#:~:text=Dalam%20seminar%20itu%2C%20Prof.%20Notonagoro,bisa%20diubah%20dengan%20jalan%20hukum>, dikutip pada tanggal 15 juni 2023.

¹⁸ Irwan gesmi, Yun Hendri, *Pendidikan Pancasila*, (Siduarjo: Uwais inspirasi Indonesia, 2018), 1.

jinawi selamat tinggal kerta raharja, atau yang saat ini lazim dikenal sebagai masyarakat adil dan tercerahkan dalam pancasila.¹⁹

Istilah Pancasila sendiri juga telah dikenal dalam rentang waktu yang sangat lama, yang dimanfaatkan sebagai sumber pandangan/pandangan moral tentang kehidupan dalam budaya Indonesia. Seperti yang terungkap dalam kemajuan pengrajin Indonesia yang tak tertandingi selama berdirinya kerajaan Majapahit dan terkandung dalam kerajinan oleh Empu Prapanca di Negara Kertagama, dan Empu Tantular dalam bukunya Sutasoma. Selain itu, dalam buku Sutasoma terdapat istilah luar biasa Krama Pancasila yang mengandung arti lima prinsip tingkah laku atau lima tatanan moral, yang meliputi:

1. Kedamaian (ahimsa)
2. Tidak bisa menerima (asteya)
3. Berusahalah untuk tidak berkeinginan (indriya nigraha)
4. Tidak bisa berbohong (amrsawada)
5. Cobalah untuk tidak mabuk oleh minuman keras (dama)²⁰

Kehadiran negara barat (Belanda) menjelang akhir 100 tahun ke-16 di Nusantara sebagai negara pionir, membawa perubahan signifikan bagi negara ini. Menjelang awal dua puluh ratus tahun, di panggung politik global menuju Timur, dua peristiwa penting terjadi. Yang paling penting, negara-negara di wilayah Asia telah dibatasi oleh orang-orang Eropa seperti Malaysia, Singapura dan India oleh Inggris. Filipina oleh Spanyol, Kamboja, Laos dan Vietnam, oleh Prancis, Indonesia oleh Belanda. Kedua, terganggunya kegairahan dunia timur yang terpisah dari perkembangan kekuatan kesadarannya sendiri, seperti Republik Filipina pimpinan Joze

¹⁹ Subandi Al Marsudi, *Pancasila dan UUD 45 dalam Paradigama Reformasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 2.

²⁰ Subandi Al Marsudi, *Pancasila dan UUD 45 Dalam Paradigama Reformasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 2.

Rizal (1898), Republik Tiongkok pimpinan Sun Yat Sen (1911), dan kemenangan Jepang atas Rusia (1905). Bagi Indonesia, peristiwa ini membawa dampak besar terhadap kegaduhan yang meramaikan kesadaran masyarakat, khususnya kebangkitan masyarakat melalui perkumpulan pembangunan “Budi Utomo” (1908) yang didirikan oleh Dr. Wahidin.²¹

Kebangkitan nasionalisme Indonesia tidak bisa dipisahkan dari kebangkitan antusiasme Asia. Namun jika dikatakan bahwa kebangkitan kembali patriotisme Indonesia akibat kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905 dan tumbuhnya generasi muda Turki pada tahun 1908 patut ditakuti, maka kecemerlangan Jepang dipandang sebagai cikal bakal masuknya negara-negara tersebut. pemulihan bangsa oranye, maka berbagai pintu terbuka juga harus diberikan secara layak. Pembuatnya umumnya akan mengatakan bahwa naiknya rasa cinta terhadap negara Indonesia merupakan salah satu bentuk reaksi dari bangsa Indonesia sendiri akibat proses garis itu sendiri. Benih-benih perlawanan masyarakat disebarkan oleh penjajah sejati, sehingga menjadi semacam penghalang.²²

Reaksi ini diselesaikan oleh negara Indonesia beberapa waktu sebelum tahun 1905 seperti jebakan para penguasa Mataram (1645), penguasa Ageng Tirtayasa (1650), Iskandar Muda (1635), Untung Surapati dan Trunjoyo (1670), Patimura (1817), Diponogoro (1825-1830), Jagaraga (1849), dan berbagai jaminan yang memiliki gaya, atribut, dan konstruksinya masing-masing. Menurut pembuatnya, peristiwa seperti kemenangan Jepang atas Rusia, kemajuan generasi muda Turki, dan peristiwa lain di luar Indonesia hanyalah faktor pemacu. Sebesar apa pun dorongannya, dengan asumsi tidak ada jiwa penghalang terhadap ekspansionisme di hati masyarakat Indonesia,

²¹ Ida bagus Brata, Ida bagus Nyoman Warta, *Lahirnya Pancasila Sebagai Pemersatu Bangsa Indonesia*, Jurnal Santi Aji Pendidikan, Vol 7, No 1, 2017,123.

²² Ida Bagus Brata, Ida Bagus Nyoman Warta, *Lahirnya Pancasila Sebagai Pemersatu Bangsa Indonesia*, Jurnal Santi Aji Pendidikan, Vol 7, No 1, 2017,124.

mungkin oposisi akan melewati titik tidak bisa kembali atau mungkin tidak akan pernah ada halangan sama sekali..²³

Perhimpunan Budi Utomo dipandang sebagai organisme pembangunan masyarakat yang belum berkembang untuk mewujudkan negara yang merdeka. Perkembangan ini merupakan awal dari perkembangan masyarakat dalam memahami negara yang memiliki kenikmatan kebebasan dan solidaritasnya sendiri. Perhimpunan Budi Utomo merupakan pelopor pembangunan masyarakat sehingga banyak bermunculan perkumpulan-perkumpulan penggerak lainnya, misalnya Serikat Pekerja Indonesia (SDI) pada tahun 1909, kemudian dengan cepat berganti nama menjadi Persatuan Islam (SI) pada tahun 1911, Partai Indische (IP) pada tahun 1913, PKI pada tahun 1920, Partai Perorangan Indonesia (PNI) pada tahun 1927, Komitmen Pemuda (1928, dan seterusnya). dengan bangkitnya perkumpulan yang dibarengi dengan cita-cita kemerdekaan bangsa..²⁴

Perang Duinia II (1939-1945) yang meliputi negara-negara bersatu (AS, Inggris, Perancis, Belanda, Rusia, China) pecah, Belanda diserang Nazi Jerman pada tanggal 5 Mei 1940 dan menyerah pada tanggal 10 Mei 1940, yang melahirkan kedaulatan Wilhemina dengan posisi pemerintahan yang termasyhur melarikan diri ke Inggris, sehingga pemerintah kekaisaran Belanda masih dapat berbicara dengan pemerintah provinsi Indonesia. Komitmen tentang kebebasan berekspresi yang telah disampaikan oleh pemerintah kekaisaran Belanda merupakan suatu metodologi agar kerangka kekuasaan publik yang dijalankan di Indonesia pada waktu itu tidak menimbulkan masalah. Bahkan sampai 10 Mei 1940 ketika mereka menyerahkan

²³ Ida bagus Brata, Ida bagus Nyoman Warta, *Lahirnya Pancasila sebagai pemersatu bangsa Indonesia*, Jurnal santi aji pendidikan, vol 7, no 1, 2017,124.

²⁴ Ida Bagus Brata, Ida Bagus Nyoman Warta, *Lahirnya Pancasila Sebagai Pemersatu Bangsa Indonesia*, Jurnal Santi Aji Pendidikan, Vol 7, No 1, 2017,125.

komitmen Belanda tentang kebebasan yang ada di depan mata, hanya sepenuhnya palsu untuk Indonesia dan tidak pernah muncul.²⁵

Pada tahun 1941 Jepang membombardir Pear Harbour, mungkin pangkalan U utama di Laut Pasifik. Itu memicu episode konflik pasifik. Tidak butuh waktu lama bagi Jepang untuk menguasai China, Filipina, dan selanjutnya Indonesia. Jepang tak henti-hentinya menumpas Belanda dan menguasai Indonesia sejak Walk 9 1942. Jepang paham bahwa menguasai Indonesia bukanlah sesuatu yang mudah, mengingat kepulauan ini sudah lama dijajah Belanda. Itu berarti budaya Belanda sudah cukup. Jepang harus berusaha untuk menarik simpati masyarakat Indonesia. Jepang meratifikasi perjanjian tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan Indonesia. Radio Jepang selalu memainkan melodi "Indonesia Raya". Jepang menyebarkan gagasan bahwa kehadirannya di Indonesia bukan untuk ekspansi kolonial melainkan untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia dari ekspansionisme Barat (Belanda).

Jepang juga mengizinkan negara Indonesia mengibarkan bendera Merah Putih dan menyanyikan lagu pengabdian masyarakat Indonesia Raya. Jurus-jurus yang dilakukan militer Jepang luar biasa kuatnya, masyarakat Indonesia membantu Jepang dalam melenyapkan dan mengusir Belanda. Sumber utama pendanaan untuk dukungan sosial untuk membantu Jepang memenangkan konflik Asia Timur adalah kepercayaan yang telah dimenangkan Jepang. Memanfaatkan kepastian Jepang, mereka mencari cara untuk membingkai hubungan pemuda (Seinendan), remaja putri (Fujinkai), pejuang PETA, dan lainnya untuk mengendalikan kemungkinan dampak Mitra dalam persaingan. Jepang juga berhasil meyakinkan masyarakat Indonesia yang mayoritas

²⁵ Ida Bagus Brata, Ida Bagus Nyoman Warta, *Lahirnya Pancasila Sebagai Pemersatu Bangsa Indonesia*, Jurnal Santi Aji Pendidikan, Vol 7, No 1, 2017,125.

beragama Islam bahwa gugur dalam perjuangan membela negara adalah “suhada” (kematian yang terbaik).²⁶

Faktanya, orang Jepang lebih biadab daripada orang Belanda. Karena kemurkaan mereka, terjadi pembangkangan oleh TNI PETA di Blitar. Publik Indonesia sangat kecewa dengan aksi Jepang tersebut. Akhirnya terjadilah perlawanan bawah tanah terhadap Jepang, dari satu sisi Jepang mulai digeser mundur oleh para mitra. Itulah yang dipahami Jepang jika kegagalan tidak segera dikalahkan, pasti akan merugikan perjuangannya untuk memenangkan Perang Asia Timur yang Lebih Besar. Terlebih lagi, untuk mengalahkannya, Jepang berjanji akan memberikan hadiah kebebasan suatu hari nanti. Sebagai pengembangan komitmen, khususnya bagi masyarakat yang mempertanyakan komitmen.²⁷

Jepang menekankan bahwa ketika komitmen ini dipahami, apakah negara Indonesia siap menjadi negara merdeka, merencanakan prasyarat yang harus dipenuhi untuk negara otonom, misalnya, apakah disiapkan berdasarkan negara. Untuk menegaskan sekaligus menegaskan kewajiban Jepang terhadap komitmen tersebut, pada Walk 1 tahun 1954, Jepang melaporkan akan membentuk Badan Wawasan Usaha Otonomi Indonesia (BPUPKI). Peresmian anggota BPUPKI selesai pada tanggal 28 Mei 1945, yang pada saat itu bertepatan dengan hari lahir penguasa Jepang (Tenno Heika) dan dihadiri oleh semua orang dan dua pejabat Jepang, yaitu Jenderal Itagaki dan Jenderal Yaicoro Najano. Pada saat perkenalan panji Merah Putih dikibarkan berdekatan dengan panji Hinomaru Jepang.²⁸

Tugas pokok BPUPKI adalah melakukan pengkajian terhadap upaya perencanaan otonomi Indonesia. Mengingat hal tersebut, BPUPKI meringkai beberapa lembar sebagai berikut:

²⁶ Ida bagus Brata, Ida bagus Nyoman Warta, *Lahirnya Pancasila sebagai pemersatu bangsa Indonesia*, Jurnal santi aji pendidikan, vol 7, no 1, 2017,126.

²⁷ Ida bagus Brata, Ida bagus Nyoman Warta, *Lahirnya Pancasila sebagai pemersatu bangsa Indonesia*, Jurnal santi aji pendidikan, vol 7, no 1, 2017,127.

²⁸ Usiono, *Membangun Karakter BangsaI*, (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2007),12.

1. Kelompok penasehat rencana terdiri dari 9 orang, dipimpin oleh Ir. Tugas Soekarno adalah menyusun draf pendahuluan konstitusi.
 2. Badan Perancang Undang-Undang Dasar yang dipimpin oleh Ir. Soekarno, dibentuk dewan kecil di sini yang diketahui Prof. Dr. Mr. Supomo.
 3. Panitia ekonomi dan keuangan, diketahui oleh Drs. Moh. Hatta.
 4. Panitia pembela tanah air, diketahui oleh Abikusyo Cikrosuyoso.
- Sidang BPUPKI dilaksanakan dalam dua tahap.
- a. Masa sidang pertama (29 Mei 1945-1 Juni 1945).

Pertemuan ini menganalisis persoalan-persoalan mendasar negara. Pak Muh merupakan salah satu tokoh yang turut serta dalam diskusi usulan asal usul negara sebenarnya. Yamen, Ir. Ir. Soekarno, dan Prof. Dr. Mr. Supomo. Pada tanggal 29 Mei 1945 Tuan Muh. Yamin memberikan ceramah yang berjudul “Standar dan Landasan Kebangsaan Republik Indonesia” dalam ceramah ini beliau mengusulkan lima pedoman yang mendekati dasar-dasar negara:

1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kejahteraan Rakyat

Pada tanggal 31 Mei 1945 Prof. Dr. Mr. Supomo menyampaikan ceramah yang berisi penjelasan tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan premis negara:

1. Paham Negara kesatuan
2. Penghubungan Negara dan agama
3. Sistem badan pemusyawaratan
4. Sosialisme Negara

5. Hubungan antar bangsa

Ia tidak secara tegas menyebutkan bahwa kelima hal tersebut diajukan sebagai premis negara. Proklamasi ini disampaikannya sebagai bahan informasi dalam rencana dasar Negara Indonesia Otonom.

Ir. pada tanggal 1 Juni 1945, Sukarno muncul dan berbicara tentang pandangan penting negara Indonesia yang otonom yang terdiri dari lima pedoman berikut:

1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme atau peri keanusiaan
3. Mufakat atau demokrasi
4. Kesejahteraan sosial
5. Ketuhanan Yang Maha Esa

Mengenai arahan seorang instruktur bahasa, Ir. Soekarno menamakan lima pancasila yang kemudian diusulkan menjadi dasar negara Indonesia. Selama jangka waktu pengujian, individu belum mencapai pemahaman tentang alasan Wilayah Indonesia. Imbalan berikutnya ditangguhkan hingga Juli, sambil menunggu pertemuan berikutnya, sembilan orang BPUPKI membentuk badan administrasi kecil yang terdiri dari:

1. Ir. Soekarno
2. Drs. Moh. Hatta
3. Mr. A. A. Maramis
4. Abikusno Cokrosuyoso
5. Achmad Soebarjo
6. Abdul Kahar Muzzakir
7. Haji Agus Salim
8. K.H.A Wachid Hasyim dan
9. Mr. Moh. Yamin

Selanjutnya dipimpin oleh Ir. Soekarno, dewan pengawas kecil (panel sembilan) berusaha untuk menyusun UUD yang nantinya perlu memuat standar dan target Negara Indonesia Merdeka. Akhirnya perjanjian itu selesai pada tanggal 22 Juni 1945 dan akibat dari perincian itu dikenal dengan Kontrak Jakarta atau Karakter Jakarta sesuai nama yang diberikan oleh Tuan Moh. Yamin.

Dalam bagian keempat Kontrak Jakarta, lima metode mendasar penalaran Negara Indonesia Otonom digambarkan sebagai berikut:

1. Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.
2. Umat manusia yang membangun.
3. Solidaritas Indonesia.
4. Mayoritas memerintah pemerintah didorong oleh kelihaiian dalam pertimbangan/penggambaran.
5. Hak-hak sipil bagi setiap orang Indonesia.

Piagam Jakarta kemudian digunakan sebagai Pembukaan UUD 1945 dengan sejumlah perubahan, khususnya yang berkaitan dengan rumusan Pancasila..²⁹

b. Masa Persidangan kedua (10-16 Juli 1945)

Penyisihan selanjutnya dimulai pada tanggal 10 Juli 1945 yang merupakan rapat BPUPKI secara keseluruhan. Pertemuan dibuka oleh direktur dengan memberikan pintu terbuka kepada individu untuk mengkomunikasikan perspektif mereka tentang masalah mendesak utama yang dirinci oleh kelompok penasehat 8. Menghitung draf pembukaan yang dibuat oleh dewan 9.³⁰

Panel penyusun UUD dipimpin oleh Ir. Soekarno sependapat bahwa pendahuluan UUD diambil dari kontrak Jakarta. Untuk mengetahui penyusunan UUD, dibentuklah sebuah dewan kecil yang diketuai oleh Prof. Husein. Pada tanggal 14 Juli

²⁹ Usiono, *Pancasila Membangun Karakter Bangsa*, (Jakarta: Hijri Pustaka Utama,2007), 12-14.

³⁰ Subandi Al Marsudi, *Pancasila dan UUD 45 dalam Paradigama Reformasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2001),25.

1945 Ir. Soekarno mengumumkan konsekuensi kerja samanya dengan para penyusun UUD dalam pertemuan tersebut sebagai berikut:

1. Pernyataan Indonesia Merdeka
2. Pembukaan UUD
3. Undang-undang Dasar (batang tubuh)

Badan penyusun konstitusi dikemukakan oleh Ir. Sukarno sependapat bahwa kata pengantar UUD diambil dari kontrak Jakarta. Untuk mengetahui penyusunan UUD, dibentuklah sebuah dewan kecil yang diketuai oleh Prof. Husein. Pada tanggal 14 Juli 1945 Ir. Soekarno menyatakan hasil kerjasamanya dengan para penyusun UUD pada pertemuan tersebut sebagai berikut:³¹

Area awal berisi pemikiran utama yang terdiri dari empat bagian, sedangkan tubuh terdiri dari 16 bagian yang berisi 37 pasal, ditambah 4 pasal pengaturan sementara, dan 2 bagian tambahan peraturan.

Rumusan Pancasila sebagai Ideologi Negara Republik Indonesia terdapat pada alinea keempat pembukaan, yang memuat asas-asas sebagai berikut:

1. Dua Tuhan dalam Satu Umat Manusia yang Adil dan Tercerahkan
2. Afiliasi Indonesia
3. Warga yang terdorong oleh wawasan kelihaihan dalam bertemu/bergambar
4. Hak sipil bagi seluruh rakyat Indonesia

Definisi dasar negara ini merupakan penyempurnaan dari perincian hakiki negara karena konsili 9 yang secara konsisten diakui oleh BPUPKI, menjadi spesifik mengenai satu undang-undang yang awalnya berbunyi: Ketuhanan dengan komitmen untuk melakukan Islam. peraturan bagi pengikutnya diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa, dan dalam ketetapan Keempat, mengganti tanda pisah (-) dengan potongan (/) di antara kalimat musyawarah dan kalimat delegasi.

³¹ Subandi Al Marsudi, *Pancasila dan UUD 45 dalam Paradigama Reformasi*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2001),31.

Dengan disahkannya UUD oleh PPKI, terhitung sekitar waktu itu Pancasila telah berubah menjadi dasar Negara, karena pengesahannya diselesaikan oleh Organisasi Kemasyarakatan yang menjadi pelopor berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan sesuai peraturan yang dilindungi memiliki kekuatan untuk menetapkan standar dasar Negara (staatsfundamentalnorm). Tentang berbagai rencana tentang Pancasila yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia sesudah Dekrit Otonomi pada tanggal 17 Agustus 1945, tercatat dalam.³²

a) Konstitusi RIS (1949)

1. Ke-tuhanan Yang Maha Esa
2. Peri kemanusiaan
3. Kebangsaan
4. Kerakyatan
5. Keadilan Sosial

b) UUDS (1950) yang memuat perumusan yang sama

Melalui deklarasi resmi pada tanggal 5 Juli 1959 dinyatakan kembali kepada UUD 1945, dan itu mengandung makna bahwa rencana Pancasila dalam UUD 1945 secara formil dan legitim merupakan substansi yang ada saat ini.³³

Latar belakang sejarah negara Indonesia juga mencatat bahwa definisi Pancasila yang ditegaskan PPKI tidak sama dengan detail yang disinggung dalam kontrak Jakarta. Hal ini terjadi karena adanya permintaan utusan untuk kepentingan golongan Rakyat Timur yang menemui Bung Hatta yang mencermati tujuh kata "Sifat Ketuhanan", khususnya dengan menjalankan syariat Islam bagi para pengikutnya. Arsitek utama negara menjawab permintaan ini dengan hati-hati sehingga terjadi

³² Subandi Al Marsudi, *Pancasila dan UUD 45 dalam Paradigama Reformasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 32

³³ Subandi Al Marsudi, *Pancasila dan UUD 45 dalam Paradigama Reformasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 33.

perubahan yang disepakati, khususnya pengusiran tujuh kata yang kemudian dipandang sebagai penghalang dan diganti dengan ungkapan "Ketuhanan Yang Maha Esa". Maka dengan demikian, amaka yang sah atau sah dari Pancasila sebagai staatsfundamentalnorm pada umumnya bersesuaian antara ketetapan-ketetapan yang termuat di dalamnya, khususnya: Ketuhanan dipertahankan dalam keberadaan negara, namun diletakkan dalam kaitannya dengan negara kekeluargaan libertarian, yang mengalahkan pemahaman perseorangan dan kebersamaan, sesuai dengan visi manusia yang adil dan berbudi pekerti, solidaritas publik, aturan pemerintahan mayoritas yang bersifat deliberatif yang menggarisbawahi kesepakatan, dan hak-hak sipil bagi setiap individu Indonesia.³⁴

Pada tanggal 12 April 1976, Soeharto mencanangkan suatu standar untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila yang disebut Ekaprasatya Pancasakra atau aturan menghayati dan mengamalkan Pancasila atau disebut juga P4. Untuk membantu pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara menyeluruh dan konsisten, mulai sekitar tahun 1978, para pakar publik telah mendesain ulang P4 secara total di seluruh lapisan masyarakat. Perencanaan P4 diharapkan mampu mbingkai pemahaman yang unik terhadap Pancasila sebagai bagian yang lebih besar dari keseluruhan undang-undang. Begitu pula dengan kesamaan pemahaman Pancasila dan UUD 1945.³⁵

Pancasila memiliki 5 undang-undang yang memiliki makna dan makna yang sangat mendalam sebagai Filsafat Negara Indonesia, di kelima undang-undang pertama berisi poin-poin dari pengalaman Pancasila yang harus diterapkan oleh orang Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Gambaran dan implikasi Pancasila adalah sebagai berikut:

1. Pancasila di lambangkan dengan burung garuda

³⁴ Redyanto Sidi, *Sejarah Pancasila Sebagai Salah Satu Awal Sejarah Hukum Indonesia*, IURIS STUDIA: Jurnal kajian Hukum, Vol 2, No 3, 2021.497.

³⁵ Adi Sudirman, *Sejarah Lengkap Indonesia dari Era Kasik Hingga Terkini*, (Jogjakarta: DIVA Pres, 2014,418.

Pancasila bercitra Garuda, sejenis burung yang memiliki cerita rakyat yang dapat dibuktikan kebenarannya bagi sejarah Indonesia. Garuda digambarkan sebagai bangsa yang besar dan negara yang kokoh. Selain itu, burung Garuda dalam Pancasila memiliki duri-duri cemerlang yang menggambarkan keagungan dan kesederhanaan. Moncong, sayap, ekor, dan kait burung garuda dapat diartikan sebagai kekuatan dan kekuatan perbaikan.

Banyaknya bulu burung garuda melambangkan hari kemerdekaan Indonesia, tepatnya 17 Agustus 1945 atau 17-8-1945. Pada setiap sayap terdapat 17 duri, 8 pada ekor, 19 pada peria/pangkal ekor, dan 45 pada leher. Lebih lanjut, burung Garuda dalam citra Pancasila menganut ungkapan “Solidaritas dalam Keberagaman” dan mengandung makna keunikan. Berbeda namun sekaligus satu. Sedangkan pada bagian dada burung garuda terdapat pengaman yang mengatur tentang 5 ketetapan tersebut.³⁶

2. Isi Pancasila dan simbolnya

Berikut adalah isi atau bunyi 5 sila beserta simbolnya:

1. Tuhan Yang Mahakuasa; ditemani Bintang.
2. masyarakat yang beradab dan berkeadilan; diwakili oleh sebuah rantai.
3. Afiliasi Indonesia; diwakili oleh pohon beringin.
4. orang-orang yang dibimbing dalam musyawarah dan perwakilan dengan kebijaksanaan; diwakili oleh kepala banteng
5. Hak-hak sipil bagi seluruh rakyat Indonesia; diwakili oleh beras dan kapas

Adapun Uraian Pancasila sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Karena ketetapan Iman kepada Tuhan Yang Tak Tertandingi umumnya memulihkan perasaan yang murni, ada kecocokan yang bersahabat

³⁶ Iswara N Aditya,” *Bunyi Isi Pancasila, Makna, Lambang, & Butir Pengamalan Sila 1-5*”, Tirta.id, [Bunyi Isi Pancasila, Makna, Lambang, & Butir Pengamalan Sila 1-5 \(tirta.id\)](https://www.tirta.id/Bunyi-Isi-Pancasila-Makna-Lambang-&Butir-Pengamalan-Sila-1-5-tirta.id), diakses tanggal 4 April 2023.

antara kelima ketetapan. Karena apa yang terjadi dengan mengaku mencengkeram premis Ketuhanan Yang Maha Esa, jika pada akhirnya kita tidak mampu bertindak sesuai dengan sifat-sifat yang patut dicontohkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, seperti cinta, simpati dan kesetaraan. . Premis Confidence in the Unrivalled God menyambut manusia untuk hidup menyatu dengan alam, terutama dengan mengembangkan persahabatan dan persekutuan di antara manusia dalam hidup mereka dengan melindungi realitas, dengan menentang semua kepalsuan. Penegasan ini mewajibkan manusia dalam hidupnya untuk menjaga keadilan, melawan dan mencegah ketidakadilan.

Pengakuan ini mewajibkan orang untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat, dan campuran yang tepat. Penegasan ini mewajibkan orang dalam hidupnya terus terang dan menghancurkan pemerasan. Penegasan ini mewajibkan manusia dalam hidupnya untuk bertindak diberkati, dan melawan semua yang berantakan baik dalam aktivitas maupun kondisinya. Pengakuan ini menuntut orang dalam hidup mereka untuk menghargai keindahan dan menghapus semua keanehan. Kualitas-kualitas ini harus dilatih karena mereka mengakui bahwa mereka akan mencengkeram dasar Keyakinan pada Tuhan Yang Tak Tertandingi. Serta mendapatkan pengarahan dari Substansi terbaik yang mutlak, sekaligus memperkuat keadaan karakter dan melahirkan orang-orang yang memiliki rasa kewajiban.³⁷

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab

Dengan asumsi ciri-ciri yang hidup dalam jiwa manusia, karena masa kanak-kanak dan masa kanak-kanak, maka pada saat itu, premis tentang manusia yang adil dan serba bisa secara alami dilakukan dalam aktivitas publik. Premis manusia yang adil dan tersosialisasikan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya hanyalah merupakan kelanjutan dari tindakan iman yang hidup kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, kedudukannya dalam permohonan Pancasila tidak dapat dipisahkan dari Ketuhanan

³⁷ Mohammad Hatta, *Pengertian Pancasila*, (Jakarta: Idayu Press, 1977),29.

Yang Maha Esa. Dalam struktur pemikiran tentang nalar manusia yang adil dan manusiawi yang bersifat umum, penting untuk memberikan tempat yang tepat dalam pengaturan tentang kebebasan dan kewajiban warga negara. Terutama yang utama, hak untuk hidup (menyelamatkan ruh), hak atas tempat yang aman bagi tubuh dan hak atas kelenturan pribadi, mengingat ketiga hak tersebut merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa.³⁸

Jadi mendapatkan keamanan cukup jauh dari Negara itu penting. Dengan itu, Negara hanya memiliki pilihan untuk mencabut dan membatasinya dalam suatu krisis, terutama sebagai disiplin pidana dalam kaitannya dengan pedoman hukum. Sesuai dengan pedoman hukum dan ketertiban yang merupakan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehubungan dengan keistimewaan tambahan yang diklaim oleh semua penduduk yang dianggap sebagai subjek yang sah. Misalnya, kebebasan properti dan hak kehormatan seseorang lebih bersifat relatif, mengingat fakta bahwa signifikansinya secara eksklusif bergantung pada filosofi setiap negara. Premis manusia yang didirikan atas kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa juga tercermin dalam ketetapan keempat dan kelima.³⁹

3. Persatuan Indonesia

Dengan nyawanya, atribut solidaritas yang ada dalam semangat masyarakat Indonesia, bahwa negara Indonesia adalah satu, tidak dapat dipisahkan. Solidaritas Indonesia juga diperkuat dengan citra negara kita, khususnya Bhineka Tunggal Ika, yang tergabung dalam berbagai struktur. Solidaritas Indonesia mengandung standar persahabatan dan persaudaraan, dalam segala hal, diganggu oleh iklim kebenaran, kesetaraan dan kemurahan hati, keaslian dan kebajikan, dan keindahan yang terus-menerus didukung secara esensial. Rasa solidaritas Indonesia juga didukung kemudian oleh pengakuan yang muncul karena keyakinan atau takdir dan tujuan yang wajar.⁴⁰

³⁸ Mohammad Hatta, *Pengertian Pancasila*, (Jakarta: Idayu Press, 1977),30.

³⁹ Mohammad Hatta, *Pengertian Pancasila*, (Jakarta: Idayu Press, 1977),31.

⁴⁰ Mohammad Hatta, *Pengertian Pancasila*, (Jakarta: Idayu Press, 1977),33.

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan /perwakilan

Sistem aturan mayoritas yang digerakkan oleh kecerdikan deliberatif/delegatif juga erat kaitannya dengan undang-undang hak-hak sipil, khususnya untuk mengakui hak-hak sipil setiap individu Indonesia. Sejalan dengan itu, sistem berbasis suara di Indonesia bukanlah pemerintahan mayoritas liberal atau sistem berbasis suara ekstremis, karena sistem ini sepenuhnya terkait dengan undang-undang yang berbeda. Kebebasan dasar dalam hal kesempatan berafiliasi, berkumpul, bersuara, dan mengarang diatur dalam pasal 28 UUD 1945 sesuai dengan standar dan tujuan negara, pemerintahan mayoritas menurut UUD 1945 adalah sistem pemerintahan mayoritas dengan wawasan permusyawaratan delegasi, dijauhkan dari peradaban/budaya Indonesia itu sendiri, gotong royong, hubungan kekeluargaan, pertimbangan untuk kesepakatan. Pedoman sistem aturan mayoritas memastikan bahwa setiap penduduk memiliki situasi yang sama dalam peraturan dan pemerintah.⁴¹

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Hak sipil bukan hanya premis Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun menjadi tujuan yang harus dilaksanakan, sehingga apa yang tertuang dalam pembukaan UUD RI tercapai. Hak-hak sipil merupakan langkah definitif untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Langkah awal untuk sampai adalah menuntaskan harapan UUD 1945 Pasal 27 ayat 2, yaitu “Setiap penduduk berhak untuk bekerja dan penghidupan sehari-hari yang layak bagi umat manusia. oleh konstitusi sedini mungkin.

Undang-undang harus menentukan bahwa upah dan tingkat pembayaran cukup untuk hidup. Selain cukup untuk makan dan berpakaian, namun juga untuk membayar sewa rumah, belanja anak, les, dan membayar berbagai macam biaya serta menabung sedikit sebagai simpanan untuk lain waktu. Sebagai individu dari Negara

⁴¹ Mohammad Hatta, *Pengertian Pancasila*, (Jakarta: Idayu Press, 1977),34.

Bersatu, otoritas publik harus berusaha secepat mungkin dengan tetap menjalankan pasal 55 sanksi Negara Bersatu, terutama yang disebutkan dalam poin (a) menuju kehidupan yang lebih baik, bisnis penuh, dan kondisi - prasyarat kemajuan dan peningkatan keuangan dan sosial.⁴²

B. Pancasila Sebagai Ideologi

Ideologi berasal dari kata Yunani *Idein* yang berarti melihat atau Pemikiran yang berarti wajah, ketinggian, pemikiran, perenungan, dan *logia* yang berarti petunjuk. Selanjutnya, filsafat adalah pengajaran atau studi tentang pemikiran atau perenungan. Pancasila sebagai falsafah merupakan inti dari kemampuan dan kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Filsafat adalah kumpulan pemikiran yang muncul dan berkembang dalam suatu pemerintahan negara. Menelaah Pancasila sebagai falsafah dalam berbagai bidang kehidupan dianggap penting untuk menetapkan sesuatu yang patut disepakati untuk menyesuaikan dan mengatur arah, penegasan dan semangat filsafat Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan.⁴³

Menurut Padmo Wahjono, filsafat adalah kumpulan pemikiran-pemikiran hakiki yang disatukan. Menurut ahli hukum suci ini, deologi merupakan kelanjutan atau hasil dari cara pandang negara terhadap kehidupan, cara berpikir hidup negara, dan akan menjadi sekumpulan nilai yang berusaha diakui dalam kehidupan masyarakat. Filsafat mampu memberikan kekuatan pedoman dalam kehidupan berkelompok dan sekaligus memberikan unsur-unsur pembangunan menuju tujuan masyarakat atau negara.⁴⁴

⁴² Mohammad Hatta, *Pengertian Pancasila*, (Jakarta: Idayu Press, 1977),35.

⁴³ Usiono, *Pancasila Membangun Karakter Bangsa*, (Jakarta: Hijri Pustaka Utama,2007), 99.

⁴⁴ Subandi Al Marsudi, *Pancasila dan UUD 45 Dalam Paradigma Reformasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo,2001), 66.

Menurut Soerjanto Poepowardojo, filosofi adalah keputusan yang masuk akal dan menyampaikan janji untuk mewujudkannya. mewajibkan itu. Sastrapratedja mengungkapkan bahwa filsafat mengandung arah menuju aktivitas. Ini adalah aturan untuk memahami kualitas yang terkandung di dalamnya. Wajar saja, sebuah filosofi menuntut agar orang-orang yang menaruh kepercayaan pada realitas memiliki kearifan, perspektif, dan cara berperilaku yang masuk akal, pas, dan sehat tentang diri mereka sendiri. Melalui inilah diyakini bahwa perspektif dan perilaku yang sesuai tanpa henti akan dikandung dan diciptakan selama menghabiskan waktu pengakuannya di berbagai bidang kegiatan publik, negara dan negara.⁴⁵

Menurut Franz Magniz Suseno, seorang pemikir, mencirikan filsafat dari perspektif yang luas dan dari perspektif yang sempit. Dalam arti yang luas dan tidak pasti, ungkapan "filsafat" digunakan untuk semua kumpulan standar, kualitas esensial, dan keyakinan yang perlu dipertahankan sebagai aturan yang mengatur. Dalam pengertian ini keyakinan bahwa negara dan ketabahan akan disebut filsafat. Penggunaan "sistem kepercayaan" oleh sebagian besar penulis dianggap tidak pantas, setidaknya salah arah. Dengan asumsi bahwa pada banyak orang kata filsafat segera membuat afiliasi negatif. Individu biasanya tidak berpendapat bahwa standar mereka harus disebut filsafat. Tetapi karena dalam bahasa Indonesia, dengan mengikuti pendekatan bicara yang secara fundamental terlacak di negara-negara sosialis (yang menjamin Marxisme-Leninisme sebagai "filsafat" yang menggembirakan), Franz Magnis Suseno melibatkan kata filsafat sebagai sesuatu yang positif, lebih spesifiknya sebagai nilai dan nilai. tujuan yang ditinggikan, khususnya dalam perasaan "sistem kepercayaan terbuka".⁴⁶

Dari perspektif terbatas, filsafat benar-benar merupakan pemikiran atau hipotesis umum tentang pentingnya kehidupan dan nilai-nilai yang secara total

⁴⁵ Usiono, *Pancasila Membangun Karakter Bangsa*, (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2007), 100.

⁴⁶ Usiono, *Pancasila Membangun Karakter Bangsa*, (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2007), 68.

memutuskan bagaimana orang seharusnya hidup dan bertindak. Filsafat dalam pengertian ini diklasifikasikan sebagai "sistem kepercayaan tertutup" karena otoritasnya tidak mengizinkan individu untuk membatasi asosiasi apa pun dengannya. Sederhananya, dengan filosofi tertutup tersirat pemikiran pasti yang langsung.

Sebagai suatu filsafat, Pancasila merupakan suatu ajaran, pemikiran, sila, hipotesa, atau ilmu pengetahuan yang dilandasi oleh keyakinan akan kebenarannya. Hal ini dijadikan sebagai pedoman hidup masyarakat Indonesia dan membantu mereka dalam menghadapi permasalahan yang dilihat oleh masyarakat. Negara dan Wilayah Indonesia Sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945, Pancasila memenuhi hakikat yang harus diketahui sebagai cara berpikir. Karena Pancasila memuat teladan, pertimbangan dan hikmah bangsa Indonesia yang diakui sah, disusun dengan sengaja dan memberi aturan dalam pelaksanaannya. Demikian pula Pancasila berfungsi sebagai sistem kepercayaan yang terbuka.

Memperhatikan Pancasila sebagai falsafah terbuka, tidak berarti bahwa sifat-sifat dasarnya dapat diubah atau diganti dengan sifat-sifat hakiki lainnya, karena seandainya ia dipahami seperti itu (sebagai pemahaman yang salah) sama saja dengan meniadakan Pancasila. atau menyanggah kepribadian/karakter negara Indonesia. Yang bertentangan dengan akal dan aktivitas yang masuk akal. Maka dalam pengertian Pancasila sebagai falsafah terbuka mengisyaratkan bahwa sisi hakiki Pancasila dapat diciptakan dengan unsur-unsur keberadaan negara Indonesia dan tuntutan zaman.⁴⁷

Pancasila sebagai filsafat terbuka mengandung tiga kualitas. Ini termasuk sifat-sifat esensial, yaitu sifat-sifat khusus yang diubah oleh orang miskin sepanjang zaman, nilai-nilai instrumen, yaitu sifat-sifat tertentu yang dinamis sesuai dengan perkembangan zaman, dan sifat-sifat yang layak, menjadi sifat-sifat khusus yang

⁴⁷ Subandi Al Marsudi, *Pancasila dan UUD 45 Dalam Paradigma Reformasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo,2001),71.

dilakukan secara nyata. Merinci dari situs Badan Pembinaan Filsafat Pancasila (BPIP), berikut penjelasan dari masing-masing nilai Pancasila.

1. Nilai Dasar

Sifat-sifat esensial tersebut menggabungkan intisari dari lima undang-undang Pancasila, yaitu keabadian khusus, kemanusiaan, solidaritas, sistem berbasis suara dan pemerataan. Kelima hal tersebut merupakan aturan-aturan krusial yang sifatnya tersebar luas, mengandung keyakinan Negara, dan mempunyai tujuan yang agung dan benar.

2. Nilai Instrumental

Kualitas instrumental menggabungkan bantalan, pendekatan, teknik, tujuan, dan fondasi yang melaksanakannya. Ide ini adalah pergantian peristiwa atau penjabaran dari kualitas fundamental. Karenanya, mengubah eksekusi sesuatu yang penting sebenarnya ingin memiliki opsi untuk mengatasi masalah yang terjadi.

3. Nilai Praksis

Penghargaan praksis mengandung pengakuan terhadap instrumen-instrumen yang hakiki dan dapat dimanfaatkan untuk eksistensi negara. Dengan nilai terakhir inilah Pancasila dapat melengkapi silih bergantinya peristiwa dan perubahan sehingga penerapannya sesuai dengan perubahan kebudayaan Indonesia.

Kedudukan Pancasila sebagai falsafah negara terekam dalam alinea keempat UUD 1945 yang membaca dengan teliti, kemudian kemerdekaan umum Indonesia itu terhimpun dalam suatu Undang-Undang Dasar Provinsi Indonesia yang dibentuk dalam suatu struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kekuasaan perseorangan, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, umat manusia yang adil dan manusiawi, solidaritas Indonesia, pemerintahan mayoritas yang digerakkan oleh

keliharaan dalam pertimbangan/penggambaran, dan dengan mengakui hak-hak sipil bagi setiap individu Indonesia.”⁴⁸

C. Konsep Negara NKRI

Berbagai negara di planet ini memiliki struktur negaranya sendiri, dan Indonesia tidak terkecuali. Berkaitan dengan sejarah panjang perjuangan kemerdekaan negara Indonesia, dan melalui pembahasan panjang para arsitek awal, maka menurut pengertian umum negara kesatuan dibingkai sebagai tipe terakhir dari tipe Negara Indonesia. Gurauan tentang tipe negara Indonesia Soekarno dan Hatta berbeda tentang tipe negara Indonesia. Soekarno mati-matian menjaga negara kesatuan sebagai kelanjutan nusantara yang telah menang sebelumnya. Sedangkan Hatta pada dasarnya memilih Indonesia sebagai negara pemerintahan yang adil, dengan motivasi untuk mengikuti berbagai keadaan geologis, sosial dan etnis. Maka negara pemerintahan merupakan jenis negara yang tepat untuk dijadikan pilihan.⁴⁹

Negara kesatuan adalah negara bebas dan berdaulat di mana seluruh bangsa dibatasi oleh hanya satu pemerintah pusat. Pemerintah pusat juga memiliki posisi untuk mengelola setiap kabupaten yang ada. Sedangkan negara pemerintahan adalah negara yang merupakan gabungan dari bangsa-bangsa yang menjadi negara persekutuan. Hal yang penting adalah bahwa dengan negara kesatuan, pemerintah pusat hanya dipercaya untuk menangani masalah-masalah yang bersifat nasionalistik, seperti strategi internasional, keuangan, perlindungan dan keamanan. Menjelang awal kemerdekaan, para arsitek awal negara ini menyepakati untuk memilih negara kesatuan sebagai bentuk negara Indonesia. Bagaimanapun, permusuhan taktis yang dilakukan oleh

⁴⁸ Kristina, *Fungsi dan Kedudukan Pancasila Sebagai Kehidupan Bangsa*, detikedu, [Function and Position of Pancasila as the Nation's Ideology - Page 2 \(detik.com\)](#), di akses pada tanggal 6 Juli 2023.

⁴⁹ Skripsi, Universitas Islam Indonesia, [05.2 bab 2.pdf \(uii.ac.id\)](#), diakses pada tanggal 6 Juli 2023.

Belanda memaksa pemerintah Indonesia untuk memilih bentuk negara kesatuan sesuai pemahaman Rapat Meja Bundar (KMB).⁵⁰

Secara formal, Indonesia tidak lagi sama dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (RIS) setelah proses KMB. Hal ini dilakukan agar Indonesia mendapat penghargaan atas ketangguhannya dari komunitas lokal di seluruh dunia. Karena Indonesia terdiri dari 7 negara bagian dan 9 daerah otonom, maka NKRI penting bagi RIS. Sebaliknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak bertahan lama. Ujian untuk kembali kepada kesetiaan seperti ini ada di negara-negara RIS. Masyarakat RIS membubarkan diri dengan bebas dan memilih bergabung dengan Republik Indonesia. Muhammad Natsir, Ketua Umum Partai Masyumi, membandingkan hasil Sidang Meja Bundar dengan tindakan Belanda yang mengisolasi Indonesia. Dalam kesempatan itu, Muhammad Natsir menyampaikan keinginannya untuk menyatukan kembali rancangan struktur pemerintahan Indonesia di DPRS RIS. Natsir Dipercaya dikenal dengan Dasar Pembinaan Natsir. Akhirnya Presiden Soekarno membubarkan RIS pada tanggal 17 Agustus 1950 dan resmi kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Setelah Indonesia memasuki masa Rebuilding, penalaran tersebut kembali berubah menjadi kondisi pemerintahan. Menurut Romo Y.B. Buku Menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia karya Mangunwijaya, Indonesia secara intelektual siap menjadi negara pada tahun 2045. 100 tahun setelah merdeka, Indonesia seharusnya punya pilihan untuk memalsukan diri sebagai negara. Romo Mangun menilai, gabungan penguasaan kekuasaan negara dan pilihan yang ada tidaklah besar. Sentralisasi seperti ini di Serbia, negara yang lebih kuat, mungkin akan menyebabkan pemberontakan seperti yang terjadi di Yugoslavia, yang justru akan membahayakan negara tersebut. Dalam bukunya, Romo Mangun menulis bahwa negara berpenduduk

⁵⁰ Admin kesbangpol, Negara Kesatuan Republik Indonesia vs Republik Indonesia serikat, [KESBANGPOL-Negara Kesatuan Republik Indonesia vs Republik Indonesia Serikat \(kulonprogokab.go.id\)](http://KESBANGPOL-Negara_Kesatuan_Republik_Indonesia_vs_Republik_Indonesia_Serikat(kulonprogokab.go.id)), diakses pada tanggal 6 Juli 2023.

200-250 juta jiwa tidak mungkin bisa ditangani secara efektif dan disepakati oleh struktur yang terkoordinasi. Kecuali jika terjadi penindasan dengan tangan terkepal besi, dan dibayar dengan darah dan air mata orang yang bersangkutan. Sebagaimana dikemukakan Romo Mangun, Bhinneka Tunggal Ika merupakan kepentingan yang paling tepat bagi suatu pemerintahan negara. Karena perbedaan dan keberagaman yang ada di Indonesia, maka perlu adanya suatu pemerintahan yang dapat mewajibkan berbagai jaringan yang ada di wilayahnya.⁵¹

Seperti yang diungkapkan oleh Master Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Prof. Mahfud MD, “Perubahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi Negara Legislatif adalah sah, tergantung persetujuan masing-masing delegasi di DPR, DPD, dan MPR? Buat saja resultannya.” Bentuk Wilayah Pemerintahannya memang sempurna, namun Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1949 merupakan upaya pemisahan Belanda. yang perlu terus memberikan dampak di wilayah Indonesia. Gus Dur menawarkan jalan tengah dalam diskusi ini. Dia tidak meminta standar “NKRI adalah kualitas masa lalu” tetapi juga tidak mempertahankan pemikiran federalis. Gus Dur menilai tujuan negara kesatuan adalah menjaga keutuhan negara, padahal rencana pemerintah sangat baik karena lebih berkeadilan. Kalau saya garis bawahi saja, namanya masih negara kesatuan, tapi komponen-komponennya pakai pemerintahan negara,” kata Gus Dur. “Itu menjengkelkan.” Gus Dur mengutarakan gagasan itu sebelum menjadi presiden penerus Habibie. Jalan fokus ini kemudian dianut oleh pemerintahan B.J. Habibie, kata Mahfud MD, melalui Peraturan Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perjanjian Moneter antara DPRD Fokus dan DPRD Umum.

⁵¹ Admin kesbangpol, Negara Kesatuan Republik Indonesia vs Republik Indonesia serikat, [KESBANGPOL-Negara Kesatuan Republik Indonesia vs Republik Indonesia Serikat \(kulonprogokab.go.id\)](http://KESBANGPOL-Negara_Kesatuan_Republik_Indonesia_vs_Republik_Indonesia_Serikat(kulonprogokab.go.id)), diakses pada tanggal 6 Juli 2023.

Pada masa pemerintahannya, Gus Dur juga memberikan otonomi yang sangat besar kepada masyarakat Papua. Rencana Gus Dur untuk mendorong desentralisasi di dalam Negara Kesatuan dapat dilihat dari hal ini. Pandangan Gus Dur ini benar-benar membanjiri perbincangan antara negara kesatuan dan pemerintahan rakyat. Gus Dur menjadi pencetus bagaimana negara kesatuan bisa menelan unsur-unsur federalistik. Sebagaimana diungkapkan Prof. Mahfud MD, meskipun aturan mengenai pemerintahan bersama telah berubah, “Pemerintahan teritorial memang tunduk pada negara kesatuan namun substansinya mencerminkan negara regulasi”. “Secara hukum, yang bisa dilakukan pemerintah pusat hanyalah menangani hal-hal yang biasa menjadi urusan ketatanegaraan, seperti keuangan, hubungan luar negeri, keamanan, dan distribusi (yang kemudian menjadi persoalan agama). Keenam fokus tersebut tetap berlaku, meski Perda Nomor 23 Tahun 2014 telah ditetapkan.”⁵²



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

⁵² Admin kesbangpol, Negara Kesatuan Republik Indonesia vs Republik Indonesia serikat, [KESBANGPOL-Negara Kesatuan Republik Indonesia vs Republik Indonesia Serikat \(kulonprogokab.go.id\)](http://kulonprogokab.go.id), diakses pada tanggal 6 Juli 2023.